



Identitas yang Terpecah dan Peluang Transformasi Sosial Budaya di Tanah Papua

I Ngurah Suryawan¹

Abstract

Artikel ini mendiskusikan kehadiran modernitas melalui program-program pembangunan dan investasi berimplikasi serius terhadap imajinasi atas identitas diri dan kebudayaan orang Papua. Introduksi modernitas memberikan peluang bagi orang Papua untuk memikirkan gerakan transformasi identitas sosial budayanya. Namun, di tengah identitas yang terpecah itulah justru kompleksitas gerakan transformasi sosial budaya itu terjadi. Artikel ini berargumentasi bahwa kompleksitas permasalahan yang terjadi di Tanah Papua harusnya diuraikan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi gerakan transformasi sosial budaya yang memungkinkan untuk dilakukan.

Keywords: Identitas, Gerakan, Transformasi sosial budaya, Imajinasi, Kompleksitas

Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi sosial, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atas(an). Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apa pun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut. Bagi Freire, pemangkasan kebebasan inilah yang menjadi salah satu ciri pendidikan yang menindas.

(Paolo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 2005 dalam Sylvia Tiwom, "Sekolah Memecah Bisu" prolog Toto Raharjo, *Sekolah Biasa Saja, Catatan Pengalaman Pendidikan Dasar di Sanggar Anak Alam SALAM*, 2014)

Pendahuluan

Seorang *paitua* (bapak) yang sudah mulai ringkih berjalan menjinjing map berwarna merah baru saja turun dari mobilnya. *Paitua* itu mendekati saya dan sejak dari itu ia seolah tidak berhenti bercerita tentang rencana pemekaran wilayahnya. Ia yang sebelumnya adalah pejabat daerah di sebuah kabupaten di Papua Barat mengungkapkan akan memperjuangkan pemekaran wilayah di kampungnya dan sebagian besar wilayah lainnya. Alasannya sederhana, “Agar masyarakat *dong* merasakan langsung dana-dana dari pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan mereka pun akan meningkat dengan sendirinya,” ungkapnya lugas. Selain pemekaran distrik, yang ada dalam pikirannya sekarang adalah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi baru di wilayah kepala burung Tanah Papua.

Paitua ini kemudian merinci bahwa jika ada orang dan daerah yang belum puas bisa mengajukan pemekaran. Misalnya ada etnik yang merasa belum diakomodasi bisa mengajukan pemekaran wilayahnya menjadi kabupaten difinitif. “Tentu *dong* (mereka) harus berjuang juga, jangan terima jadi saja,” jelasnya. Perjuangan yang dimaksud *paitua* ini adalah memobilisasi dukungan di masyarakat, bekerjasama dengan anggota dewan dan pejabat bupati induk agar memberikan izin dan merekomendasikan pemekaran tersebut. Singkatnya bagaimana membuat dukungan pemekaran tersebut menjadi kuat dan betul-betul diperjuangkan oleh para pejabat agar menjadi terealisasi.

Pemecahan wilayah melalui pemekaran seperti ilustrasi di atas jamak terjadi di Papua. Para birokrat di sebuah provinsi misalnya akan memikirkan kembali untuk menoleh kampungnya untuk dimekarkan. Peralihan aparat birokrat agar mendapatkan posisi yang lebih “terhormat” di wilayahnya sendiri juga terjadi. Arus migrasi birokrat menjadi sebuah fenomena yang tak terbantahkan. Ujungnya adalah jaringan etnik dan kekeluargaan yang menjadi salah satu basis kuat dari desain pemekaran sebuah wilayah. Tentu persoalannya tidak sesederhana demikian. Polarisasi di internal etnik di Papua juga terbukti menjadi pemicu dari rencana pemekaran daerah.

Selain migrasi penduduk pendatang yang selalu dikhawatirkan dari pemekaran daerah, migrasi birokrat dan perebutan posisi-posisi jabatan pemerintahan merupakan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya dari sebuah daerah operasional baru hasil dari pemekaran daerah. Pengalaman saya menyaksikan bagaimana para birokrat berkumpul untuk merebut hak jabatan di daerah pemekaran menggambarkan semuanya. Suatu hari di

pertengahan Februari 2013. Di halaman sebuah ruang pertemuan besar di pusat kota Distrik Ransiki tampak sesak dengan puluhan warga. Beberapa warga juga berkumpul di “mata jalan” (pinggir jalan) sebuah gereja megah yang berhadapan dengan gedung pertemuan distrik. Di dalam ruangan, kursi-kursi plastik sudah diatur memenuhi ruangan. “*Tong* (kita) harus bicarakan ini baik-baik. “Barang” (pemekaran daerah) ini datang untuk *tong* semua, jangan sampai orang-orang kabupaten duduk-duduk *baku atur* (saling mengatur) urus “barang” yang *tong* punya,” ujar seorang *paitua* (orang tua) berbaju batik Papua biru sambil mengunyah sirih pinang. *Paitua* ini adalah salah satu guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mempunyai hak ulayat di daerah pemekaran ini.

Para PNS yang berasal dari keseluruhan distrik tersebut telah membentuk sebuah tim untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengaturan posisi-posisi birokrasi di kabupaten baru ini. Mereka sebagian besar adalah para PNS yang bertugas di berbagai dinas di kabupaten induk yang berbondong-bondong ingin menempati jabatan di kabupaten baru. “*Kitong* para PNS *ni* harus menjadi tuan di *kitong pu* tanah. Jangan bawa orang dari luar. *Tong* juga *tra tau* (tidak tahu), *dong* (mereka) mau *kah* tidak? *Nan tong tra* (Nanti kita tidak) dapat bagian lagi,” ujar seorang PNS menyambung pertemuan siang itu.

Suasana menjadi tegang dan memanas ketika pimpinan rapat mulai mendata nama-nama PNS yang pantas untuk dipromosikan menempati jabatan di kabupaten baru tersebut. “*Tong* hanya berharap PNS-PNS yang memang “anak tanah” ini bisa menikmati pemerintahan baru yang terdapat di tanah kita sendiri. Jangan semua jabatan-jabatan penting dipegang oleh orang luar dan *tong* menjadi penonton. *Tong* harus menjadi pelaku di daerah pemekaran ini. *Kitong pu* (kita punya) tanah yang sekarang jadi “barang ini” (pemekaran daerah),” katanya disambut oleh tepuk tangan warga dalam ruang pertemuan.

Demam pemekaran memang disambut oleh sebagian besar warga masyarakat dengan harapan akan datangnya kesejahteraan. Namun jika secara cermat dilihat, cita-cita tersebut sangat kental bermuatan ekonomi politik. Argumentasi yang selalu terbangun dari perjuangan tersebut adalah *tong pu hak* (politik) untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pemilik tanah. Tidak ada yang salah dari alasan ini. Otonomi khusus dan berbagai program afirmasi (pemihakan) yang dilakukan oleh negara adalah tersirat sebagai bentuk pengakuan—meski diakui atau tidak—dari abainya negara terhadap tanah dan rakyat di bumi cenderawasih ini.

Implikasi yang serius dari pemekaran ini adalah terpecahnya (kembali) Papua menjadi lokalitas-lokalitas kekuasaan. Lapisannya kini menjadi semakin kompleks ketika argumentasi-argumentasi etnik/suku dipergunakan sebagai dasar dalam tuntutan pemekaran baik distrik (kecamatan) maupun kabupaten. Sejalannya (liniernya) argumentasi primordial ini dengan pemekaran daerah ini tentu sangat merisaukan karena akan membuat Tanah Papua (kembali) terkotak-kotak. Hirarki kebudayaan dan keanekaragaman etnik dan budaya yang tinggi telah menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam melihat Papua. Dan kini, dengan berlangsungnya pemekaran daerah semakin menambah kompleksitas persoalan. Tumpang tindih politik pemekaran dan birokrasi dengan kepentingan primordial suku saling berkelid dan silang-sengkarut yang mendominasi perbincangan tentang isu-isu pemekaran daerah.

Hirarki primordial suku dan sistem nilainya telah mengkonstruksi kebudayaan Papua sebelumnya. Pada tataran ini, orang Papua hanya sebatas memikirkan diri dan lingkungan sukunya sambil membina jaringan kekerabatan melalui perkawinan dan ritual-ritual agama dan kebudayaan. Masuknya pemekaran daerah mengguncang hirarki primordial ketika berbagai kepentingan justru memecah belah kelompok suku ini sembari berhitung keuntungan ekonomi politik apa yang bisa didapat. Di momen inilah mengimajinasikan pemekaran daerah linier (sejalan) dengan kelompok etnik/suku menjadi sangat riskan dan berbahaya dalam kondisi transformasi Papua. Argumentasi yang mengandaikan sebuah wilayah didominasi oleh sebuah kelompok etnik/suku tertentu menyangkal realitas akulturasi dan interkoneksi Papua dengan dunia luar. Pemikiran ini mengembalikan pemikiran tentang kekhasan dan kelokalan kebudayaan Papua dalam sebuah wilayah yang seolah-olah tertutup dengan perubahan.

Pemekaran daerah sebenarnya adalah peluang bagi setiap etnik di Papua untuk merespon realitas akulturasi dan perubahan sosial yang terjadi. Peluang terbentuknya pemerintahan baru memungkinkan momen lebih besar untuk setiap masyarakat tempatan untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan. Secara ekonomi politik, kesempatan pemekaran daerah bagi masyarakat setempat adalah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengelola secara politik daerah mereka. Namun titik balik yang sering terjadi adalah tersingkirnya masyarakat lokal dari pelayanan public yang layak dan kehilangan kekuasaan politik untuk mengatur daerahnya sendiri. Kedaulatan masyarakat ini diambil alih oleh para elit birokrasi dan lapis-lapis elit lainnya (kepala kampung, tokoh adat dan agama dan yang lainnya) yang berkolusi dengan elit birokrasi dan kuasa investasi modal.

Memang tidak mengeneralisir, namun desain pemekaran daerah sama sekali tidak memikirkan implikasi-implikasi kebudayaan yang akan terjadi. Yang selalu menjadi fokus utama diantaranya adalah gedung pemerintahan, kesiapan birokrasi, dan peluang-peluang ekonomi politik bagi masyarakat—lebih tepatnya para elit lokal.

Artikel ini mencoba menelusuri bagaimana dinamika identitas sosial budaya di Tanah Papua dalam kondisi pemekaran daerah yang terus menjamur menjadi tuntutan masyarakat (para elit?). Bagian awal artikel ini akan mendalami bagaimana logika-logika yang terbangun dari introduksi modernitas di Tanah Papua. Salah satunya adalah ketika kuasa kapital Trans National Corporation (TNC) masuk dan menguasai hampir keseluruhan wilayah Pulau Papua. Pada momen inilah persoalan menjadi tambah kompleks. Pertemuan masyarakat tempatan dengan (mimpi) dunia global mempertaruhkan kehidupan mereka. Pertaruhan hidup yang paling nyata tersebut adalah ketika tanah-tanah yang menjadi “mama” dan gantungan kehidupan mereka diserobot perusahaan-perusahaan investasi yang nirhistoris tetapi dengan kekuatan modal plus jasa keamanan mendaku tanah masyarakat tempatan. Pada akhirnya relasi historis masyarakat tanahnya menjadi terputus. Pada titik inilah digugat secara terus-menerus identitas sosial budaya orang Papua ketika mereka tidak lagi mendaku tanah. Bagian akhir dari artikel ini mendalami secara teoritik bahwa modernitas dan pemekaran daerah adalah peluang-peluang untuk terhubungnya (interkoneksi) orang-orang Papua dengan dunia global. Interkoneksi ini menjadi peluang bagi orang-orang Papua untuk memikirkan kembali tentang diri dan lingkungan sosial budayanya. Peluang-peluang gerakan pembaharuan identitas sosial budaya sangat memungkinkan untuk terjadi. Namun lagi-lagi, itu tidaklah mudah dan ada banyak hal yang sangat menentukan. Artikel ini mencoba untuk memaknai jalan berliku proses transformasi sosial budaya tersebut bagi orang Papua.²

Memeluk Mimpi (Investasi) Pembangunan

Pada sebuah kesempatan mengunjungi Kota Sorong akhir Januari 2014, saya menyaksikan dan menangkap kesan yang sangat gamblang bagaimana wacana pemekaran menjadi pembicaraan yang sangat menggairahkan. Paling tidak itu yang saya saksikan di ruang depan dua hotel yang cukup besar di Kota Sorong. Para elit-elit lokal dengan berpakaian rapi dan bersepatu kulit sejak dari sarapan hingga melewati makan siang hari begitu asyik berdiskusi menghabiskan waktu mereka ditemani rokok dan sirih pinang. Saya perhatikan dan mendengarkan

beberapa bagian pembicaraanya seputar persoalan pemekaran daerah di kawasan kepala burung Papua.

Saya merasakan pergunjingan dan gosip politik yang tidak jelas ujung pangkalnya tentang pemekaran daerah menjadi candu yang menggiurkan sekaligus memabokkan, khususnya bagi para elit local dan secara pelan namun pasti hingga ke masyarakat akar rumput. Berita media-media massa pun membahas tentang pro dan kontra seputar wacana pemekaran daerah yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Wacana pemekaran telah menjadi konsumsi publik dan menjadi penegasan bahwa perbincangan tentang politik menjadi hal yang dominan tentang Papua melebihi hal yang lain.

Jika menelisik ke belakang, sejarah pemekaran di Tanah Papua berawal dari terpecahnya Provinsi Irian Jaya menjadi Irian Jaya Barat (kini bernama Provinsi Papua dan Papua Barat). Berdirinya provinsi baru yang nama sebelumnya adalah Irian Jaya Barat berawal dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia pada 16 September 2002. Para tokoh-tokoh masyarakat Papua ini menyampaikan agar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri segera mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah ditetapkan pada 12 Oktober 1999. Provinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 45/1999 dan dipercepat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003. Peresmian Kantor Gubernur Irian Jaya Barat dilakukan oleh Pejabat Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri yang berlangsung pada 6 Februari 2003.

Terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Papua Barat seperti Kaimana, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Maybrat, dan dua yang terbaru yaitu Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak menggambarkan begitu bergairahnya keberlangsungan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua Barat. Di tengah diversitas budaya yang tinggi di wilayah *vogelkop* (kepala burung) ini, selalu muncul keinginan untuk memecah wilayah kembali dalam bentuk kabupaten-kabupaten baru. Demam pemekaran sangat jelas terlihat dari keinginan beberapa elemen rakyat Papua untuk memekarkan daerahnya menjadi 33 DOB, 10 DOB adalah hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat. Hal ini sangat mencengangkan sekaligus mengundang keprihatinan akan proses dan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Sementara demam pemekaran terus bergulir, Tanah Papua telah terpapar dengan kuasa kapital global berwujud perusahaan-perusahaan yang menysar wilayah-wilayah pemekaran tersebut, dimana sumber daya alam dalam berbagai bentuk tersimpan di Bumi Cenderawasih ini. Perusahaan investasi hadir silih berganti berhubungan langsung dengan masyarakat di

kampung-kampung. Momen pertemuan inilah yang berimplikasi serius dalam berbagai bentuk.

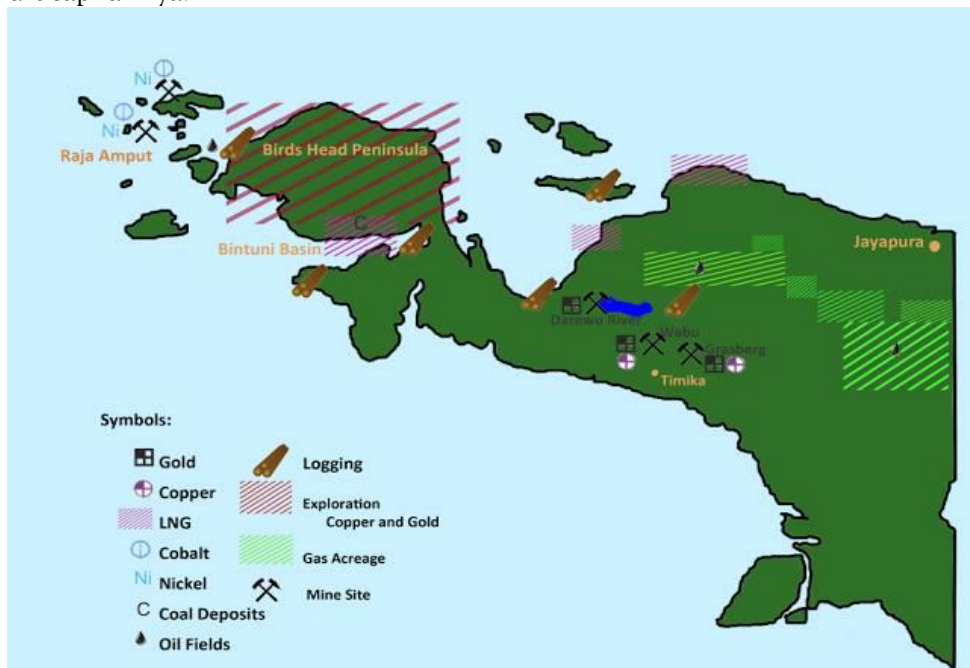
Di bukit sebuah kampung, saya berdiri di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mempunyai rumah kayu yang megah di ujung kampung. Letaknya mengelilingi rumah penduduk di kampung. Jika berdiri di teras rumah Pustu itu, akan terlihat pemandangan yang sangat indah sekitar Teluk Etna yang mengelilingi kampung. Tampak jembatan kayu panjang yang membelah teluk sebagai tempat bersandar kapal yang merupakan alat transportasi satu-satunya yang mengitari kampung-kampung. Namun sayangnya, Pustu yang bagus ternyata tidak berpenghuni para bidan dan perawat. Sudah sejak 2 tahun lalu sejak saya berkunjung di tahun 2013, perawat sudah pergi ke kota dengan kapal dan tak kunjung kembali. Mama Yoselin yang saya temui tinggal di Pustu menuturkan bahwa Ia lah kini yang menjadi perawat. Ia yang menggantikan perawat yang sebenarnya di kampung. Ia rutin turun ke kota untuk mengambil obat-obatan di RSUD Kaimana dan Dinas Kesehatan. Ia bersyukur mendapatkan pendidikan kesehatan saat zaman Belanda. Sisa-sisa pengetahuan itulah yang ia praktikkan untuk pengobatan sederhana warga kampung. Sungguh ironis.

Fragmen di atas hanya cukilan dari bergitu banyak hal-hal ironis yang terjadi di Tanah Papua. Jurang pembangunan di kota dan kampung-kampung menganga lebar. Mimpi akan sukses pembangunan seperti kota-kota di Jawa tepapar dengan gamblang melalui program-program pembangunan yang tidak mengakar. Derasnya informasi dan visual melalui televisi membuat rakyat Papua begitu yakin bahwa mimpi kesuksesan pembangunan seperti di Jawa akan ada di kampung mereka. Di sisi lain, investasi telah merangsek dan menggerus sumber-sumber penghidupan mereka selama ini. Hutan tempat mereka berburu telah berubah menjadi kebun sawit atau derus mesin pemotong kayu. Sementara hutan sagu mereka telah berubah menjadi rumah-rumah para pemotong kayu. Tempat-tempat sakral dan keramat juga telah berubah menjadi jalan-jalan tempat alat-alat berat milik perusahaan lalu lalang.

Menyadari hal itu, tanah yang sebelumnya tidak ternilai harganya karena hanyalah hutan kini bisa diuangkan dengan menjualnya ke perusahaan. Maka mulailah konflik-konflik terjadi, bukan hanya antara masyarakat dengan perusahaan yang masuk melakukan investasi ke kampung mereka. Bahkan, di internal masyarakat tempatan (lokal) tidak jarang konflik terjadi. Tanah yang sebelumnya hanya ditumbuhi pohon-pohon, yang mereka bayangkan tidak akan mungkin laku terjual, kini bisa diuangkan dengan menjualnya kepada para investor yang dalam sekejap akan merubah kehidupan mereka sekaligus wajah kampung.

Namun permasalahan mulai muncul saat tanah bisa diuangkan ketika investasi berwujud perusahaan-perusahaan kayu membelah hutan-hutan kayu mereka. Masalah itu biasanya terkait dengan batas tanah dan hak pengakuan pada wilayah ulayat ketika perusahaan bermaksud untuk memberikan ganti rugi berupa uang. Masyarakat berebut untuk mengakui bahwa merekalah yang mempunyai hak atas tanah tersebut dengan harapan akan mendapatkan ganti rugi. Hal inilah yang nantinya menimbulkan konflik antara sesama warga kampung. Selain pembuktian secara benda dan mengetahui serta mampu menunjukkan batas-batas tanah sesuai dengan warisan leluhur, cara “Sumpah Adat” juga dilakukan warga kampung untuk membuktikan kebenaran hak kepemilikan tanah tersebut.

Sumpah adat yang dimaksud adalah dengan ritual “makan tanah” sebelum berbicara tentang asal-usul pengakuan kepemilikan tanah. Kalau dalam pengakuannya nanti dia menipu, maka tanah yang akan menelan dia. Selama pertengkaran yang terjadi dan disepakati untuk melaksanakan sumpah adat ketika masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya, maka kutukan adat akan berjalan. Sumpah itu mereka sendiri yang akan menanggung resiko dan tanggungjawabnya, termasuk didalamnya keturunan maupun kelompok marganya. Sampai saat ini sumpah adat tidak pernah meleset dan selalu menelan korban bagi yang menipu dari apa yang diucapkannya.



Peta persebaran berbagai jenis investasi di Tanah Papua (foto: Dokumentasi Tabloid Jubi).

Pemerintah dan perusahaan membawa mimpi modernitas melalui janji-janji “pembangunanisme” yang menawarkan kemajuan, keluar dari keterisoliran, peradaban baru, dan tentu saja kehidupan (kesejahteraan) yang lebih baik. Namun mimpi itu harus dibayar dengan hilangnya “kehidupan” mereka sebelumnya yaitu tanah mereka. Masyarakat lokal Papua yang berada di kampung-kampung mendadak dan dipaksakan harus beradaptasi dengan dunia dan kebudayaan baru. Sudah tentu ada begitu banyak implikasi yang akan terjadi.

Pemerintahan yang bekolusi dengan investasi dengan rezim administrative ekonomi politiknya mendorong secara terus-menerus perubahan pada tingkat provinsi, kabupaten, bahkan distrik, dan kampung-kampung dengan berbagai cara dan program. Secara sporadis dan sangat tergesa-gesa, kampung dan masyarakatnya bergerak sangat dinamis bahkan diluar perkiraan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi tingkat elit (Otsus, pemekaran-pemekaran daerah, dan UU Desa).

Introduksi berbagai macam program tersebut mengakibatkan masyarakat lokal terpapar dalam interkoneksi (pertautan) dengan dunia luar dan nilai-nilai baru. Seturut dengan itu, mereka dituntut untuk merespon perubahan ini dengan cara-cara mereka sendiri. Perubahan itupun tidak main-main karena menyangkut secara langsung terhadap nasib diri mereka, identitas, dan kebudayaannya. Pada awalnya yang terjadi adalah fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat dan masyarakat yang terus-menerus mencari nilai-nilai dan solusi dalam menghadapi perubahan tersebut. Respon itu adalah sangat wajar, namun lebih daripada itu diperlukan konsolidasi di internal masyarakat untuk merespon perubahan sosial yang sedang terjadi. Solidaritas dan integrasi sosial yang pernah dan mungkin masih terjadi kampung-kampung mulai terkikis habis karena keterpecahan di tengah masyarakat akibat merespon nilai-nilai baru ini. Oleh sebab itulah praktik-praktik konsolidasi di tengah masyarakat untuk memperkuat integrasi dan solidaritas sosial mutlak diperlukan. Bagaimanapun masyarakat di kampung-kampung tidak mungkin akan menghindari dari realitas sosial yang menuntut mereka untuk bersikap.

Hadirnya pemerintahan, agama, dan program-program pembangunan mentautkan masyarakat tempatan (lokal) kepada nilai-nilai baru. Tentunya hal ini berhubungan dengan pembentukan kebudayaan yang berada di wilayah mereka sendiri. Sejatinya mereka (masyarakat lokal) adalah komunitas yang dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dalam dinamika itu ada dua proses yang berbeda. *Pertama*, proses itu merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan. Di

sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat berhasil mengidentifikasi dirinya dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, yang mampu membuat sejarahnya sendiri atau menghadirkan waktu transendennya sendiri. *Kedua*, adalah yang berhubungan dengan merasuknya kuasa pembangunan dalam kesadaran kita bukan sebagai sintesa proses historis budaya-budaya tempatan, tetapi lewat daya pikat citra suksesnya di negeri-negeri industri maju yang didukung kekuatan modal. Negara-negara inilah yang selalu menjadi contoh dari suksesnya pembangunan. Mimpi untuk sukses dan berhasil tentunya hak semua orang. Namun dalam kasus intoduksi pembangunan dan nilai-nilai budaya global yang tercermin di masyarakat kampung (perdesaan), kita membayangkan kesuksesan pembangunan dari daerah-daerah lain, bukan pada daerah kita sendiri (Laksono, 2000).

Justru persoalannya yang terjadi adalah kita baru dapat memeluk mimpi dan citranya (bukan/belum suksesnya) yang mengacu daerah lain, tetapi telah melepas pegangan kita pada pengetahuan budaya yang telah lama kita bangun. Itulah realitas yang terjadi dalam proses besar-besaran dan berlangsung massif berkelanjutan dalam perubahan sosial yang terjadi di kampung-kampung (perdesaan) di Indonesia, tak terkecuali di Papua. Pegangan yang kini perlahan namun pasti lepas dari pegangan masyarakat lokal di kampung-kampung adalah sumber daya alam dan nilai-nilai kebudayaan tradisional yang telah terbukti menghidupi warganya. Lebih daripada itu, identitas dan kepercayaan diri masyarakat untuk melanjutkan hidupnya semakin lama semakin terkikis akibat penetrasi nilai-nilai modern yang justru membingungkan mereka.

Masyarakat dan Keterputusan Sejarah

Di tengah masyarakat berkembang sebuah “sejarah” yang hidup membadan dalam keseharian mereka. Konstruksi “sejarah” mereka kelola sendiri dalam akumulasi pengetahuan dalam berbagai bentuk simbol-simbol yang menjadi pedoman hidup di tengah masyarakat. Narasi-narasi yang berkembang itulah yang senantiasa dituturkan secara lisan dan berkembang menjadi kepercayaan dalam masyarakat. Kepercayaan yang dimaksud adalah yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka berkomunitas. Lahan namun pasti tradisi *oral tradition* (tradisi lisan) inilah yang menjadi identitas dan jati diri kebudayaan dari masyarakat yang tumbuh subur di desa-desa dan wilayah perkampungan di seluruh negeri ini.

Dalam mengkontruksi sejarah tersebut, masyarakat memanfaatkan keseluruhan gagasannya tentang hidup berkomunitas. Gagasan berkomunitas dan beragam sistem pengetahuan itulah yang tersimpan dalam tradisi-tradisi lisan yang terpedam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi lisan dalam narasi-narasi pengetahuan masyarakat itulah yang dipercaya sebagai “kebenaran” namun alpa untuk dituliskan. Pengetahuan ini tersebar di berbagai kalangan masyarakat dan hidup menyebar dalam keseharian. Oleh karena bersifat tradisi lisan dan hidup dalam keseharian masyarakatnya, “sejarah” tersebut menjadi seolah-olah terlupakan karena dianggap tidak ilmiah dan “tidak tertulis”. “*No document no history*” menjadi pernyataan untuk menyingkirkan pengetahuan lisan yang hidup di tengah masyarakat.

Sejarah penjajahan (kolonialisme) secara sadar membentuk identitas dan kebudayaan masyarakat yang dijajahnya. Dalam proses pembentukan (konstruksi) identitas dan kebudayaan itulah jejak-jejak kolonialisme masih melekat dan membayangi setiap gerak langkah sejarah dan peradaban dari rakyat di negeri bekas jajahan. Sisa-sisa peninggalan sejarah kolonisasi itulah yang sering digugat dari kajian-kajian pascakolonialisme untuk membongkar kekuasaan ilmu pengetahuan dalam membentuk negara-negara jajahan. Kajian pascakolonialisme ini berusaha untuk menelisik kembali jejaring pengetahuan yang dibangun oleh negara penjajah untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. Namun, tentu saja pekerjaan ini tidak mudah karena menyangkut akar-akar ideologi dan kekuasaan yang merasuk ke dalam pemikiran rakyat di negeri terjajah. Persoalannya bukan hanya pada kekuasaan secara fisik, tetapi menyebarkan kekuasaan dalam pikiran yang membadan serta menyebar dalam keseharian masyarakat yang dijajah.



Salah satu lukisan karya Yakobus Degey
(foto: I Ngurah Suryawan).

Kolonialisme dan berbagai pengkritiknya—dalam kajian-kajian pascakolonialisme— memang hingga kini menjadi momok yang terus-menerus direproduksi dengan cara-cara baru untuk menciptakan “kolonialisme gaya baru”. Cara pemikiran inilah yang berkembang di tengah masyarakat dalam hal cara berpikir dan berperilaku sebagai “kolonial” yang “menjajah” sesama rakyat. Namun selain kolonialisme, ada satu ideologi lagi yang memporakporandakan jalinan sejarah yang mengikat masyarakat dengan kebudayaannya.

Kolonialisme mungkin dapat dikatakan sebagai biang keladi yang memutuskan proses pengontrolan sejarah yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tetapi itu pun hanya benar untuk sebagian karena dampak kolonialisme di Indonesia beragam dan juga karena adanya dualisme kebijakan kolonial di negeri jajahan. Ketika itu, terutama sepanjang pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat pribumi diberi ruang tersendiri yang praktis terpisah dengan masyarakat Eropa dan migrant lain, sehingga terjadi masyarakat plural dimana seluruh segmennya hidup dalam dunianya sendiri. Mereka bertemu hanya di pasar dan bersatu di bawah kuasa pemerintah kolonial. Di bidang hukum misalnya, masyarakat pribumi diurus oleh hukum adatnya, sehingga para kepala adat punya wewenang memutuskan perkara. Sementara warga Eropa punya hukumnya sendiri. Sekrang dualisme di bidang hukum ini secara formal habis. Itu pun bukan semata-mata akibat proses pembangunan karena sudah dimulai sejak diberlakukannya UUDS 1950. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa kita perlu melihat patahnya kekuatan masyarakat tempatan itu secara lebih historis.

Dove (1985) mengungkapkan, bahwa puncak perubahan itu terjadi ketika bangsa Indonesia menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Katanya, pembangun di Indonesia telah diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, sehingga apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap keterbelakangan, termasuk kebudayaan tradisional komunitas tempatan yang dipandang sebagai penghalang proses pembangunan, yang diartikan secara sempit sebagai modernisasi. Pembangunan itu dengan demikian identik dengan kesadaran baru yang hadir dan diterima lepas dari budaya tempatan. Oleh sebab itulah maka terjadi proses *kedua* yaitu merasuknya pembangunan dalam kesadaran kita bukan sebagai sintesa proses historis budaya-budaya tempatan, tetapi lewat daya pikat citra suksesnya di negeri-negeri industri maju yang didukung kekuatan modal. Negara-negara inilah yang selalu menjadi contoh dari suksesnya pembangunan.

Tentu saja dan benar kita ingin sukses. Persoalannya yang terjadi adalah, bahwa kita baru dapat memeluk citranya (bukan/belum suksesnya) tetapi telah melepas pegangan kita pada pengetahuan budaya yang telah lama kita bangun. Kondisi di pelosok dan pedalaman tampak bahwa degradasi sumber-sumber daya alam dan pengetahuan setempat selalu diiringi dengan peningkatan konsumerisme yang digerakkan oleh pesona mode di sektor konsumtif dan bermuara pada krisis identitas dan disintegrasi sosial. Warga masyarakat tempatan pun ikut-ikutan mengeksploitasi/merusak alam yang jadi ibu pertiwinya. Banyak orang akhirnya menjadi positivistik, padahal sumber-sumber daya alam dan pengetahuan tempatan kita itu terbatas dan telah terkait dengan tradisi sehingga tidak mungkin memuaskankan pikiran macam itu, kecuali jika kondisi masyarakat tempatan ini dilupakan atau dianggap tidak ada.

Kondisi ini sebenarnya merefleksikan bahwa tersingkirnya masyarakat tradisional itu tidak semata-mata merupakan hilangnya keaslian kebudayaan tradisional masyarakat tempatan, tetapi merupakan soal hilangnya pribadi dan rasa percaya diri masyarakat tempatan dan juga masyarakat kita pada umumnya. Hal ini dengan gamblang menunjukkan betapa kita menjadi tergantung pada suatu proses yang sumber-sumber kekuatannya dari luar kuasa kita. Pada titik inilah pemerintah (pusat) terpaku dan kehilangan dinamikanya. Perlunya partisipasi sesama warga sebagai partner menjalani pembangunan pun sering dianggap tidak ada. Lingkungan alam dan komunitas-komunitas tempatan kemudian dijadikan semata-mata sebagai garis depan yang harus ditaklukkan dan bukan sebagai partner menjalani sejarah.

Pada momen seperti inilah menjadi sangat penting mentautkan imajinasi (bayangan) akan perubahan sosial yang dimimpikan oleh masyarakat tempatan dengan gerakan untuk inisiatif perubahan dalam diri sendiri. Hal ini sangatlah penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk tetap berada dan berjuang di tengah deru perubahan sosial yang perlahan namun pasti berada di depan kehidupan mereka. Kondisi transformasi sosial-budaya yang terjadi memaksa masyarakat untuk mengambil respon atau menanggapi situasi yang terjadi. Pada situasi inilah sangat diperlukan usaha-usaha dalam memediasi kemandirian dan imajinasi masyarakat untuk selalu terlibat dalam perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat terlibat bukan hanya sebagai penonton namun sebagai subyek yang menentukan arah perubahan, terutama perubahan yang diinginkan oleh dirinya sendiri sebelum berlangsung di tengah masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks Papua, memediasi kesadaran ini tentu saja menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan itu bersumber kepada situasi keterpecahan yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari pembangunan seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu, situasi ketergantungan dan kehilangan kepercayaan diri juga menjadi situasi yang rumit untuk menguraikan akar dari persoalan yang terjadi di masyarakat. Situasi ketergantungan terhadap berbagai macam “bantuan” dan akses ekonomi politik juga membuat masyarakat hanya terlibat dalam lingkaran yang “mematikan” untuk melakukan inisiatif perubahan sosial dalam dirinya sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan.

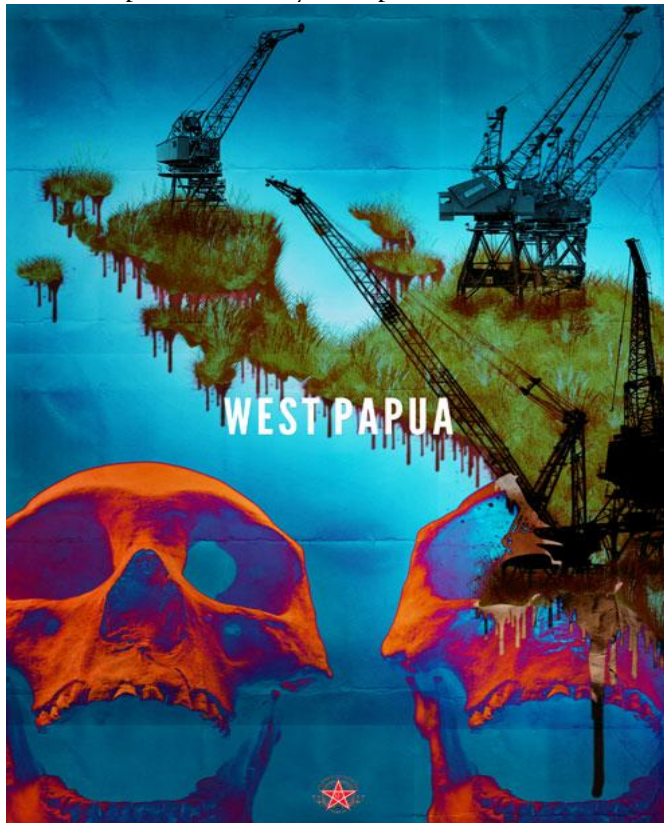
Tanah, Sejarah, dan Hidup Itu Sendiri

Saat mengunjungi sebuah kampung di Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, saya mendapatkan pelajaran berharga pada sebuah diskusi di *para-parakampung* bersama 4 *paitua* yang menemani saya ke kebun mereka yang saling berdekatan. Seorang *paitua* mengungkapkan, “Orang Papua itu belum mampu kelola hidup. Hutan itu yang hidupi orang Papua. Orang Papua tidak bisa kelola tanah yang tandus. Bagaimana *tong* mau kelola hutan kalau hutan *su* dijual ke pengusaha.”

Mereka belajar dari pengalaman saudara mereka di Aroba, Tofoi, Furwata dan Tanah Merah (Kabupaten Teluk Bintuni). Hutan-hutan yang terbentang antara Aroba, Furwata sampai Teluk Arguni Atas (Bintuni) sudah habis ditebang karena masuknya perusahaan kayu dan kelapa sawit. Mereka tidak lagi mempunyai hak atas hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Pengalaman pahit dari saudara mereka itulah yang membuat mereka kini berhati-hati menjaga hutan agar tidak lepas dari kepemilikan adat mereka. “*Tong* sekarang *tra* sembarang jual hutan dan tanah. Bagaimana *tong pu* generasi selanjutnya?” tanya seorang *paitua* sambil menunjukkan ke arah ujung bukit yang mereka sebut dengan *jaindab* (lokasi matahari turun).³

Dinamika dan kompleksitas di internal masyarakat adat tentu adalah salah satu poin penting yang harus dicermati. Politisasi adat untuk kepentingan para agen-agen atau elit-elitnya susah terbantahkan. Komunitas adat dan kebudayaannya juga salah kaprah jika dianggap “murni” dari polusi-polusi interkoneksi global yang menysasar kampung-kampung. Introduksi pembangunan dan investasi sebagai kesadaran baru melepaskan relasi historis rakyat dengan tempat (tanah/hutanya) (Laksono 2002).

Pembangunan jelas memerlukan tanah untuk mendirikan infrastruktur fisik sebagai salah satu wujud pembangunan selain pembangunan sumber daya manusia di lokasi pembangunan itu sendiri. Hadirnya pembangunan tentu membawa kesadaran dan pemahaman baru ke dalam masyarakat local. Bertemunya ide baru pembangunan dengan kehidupan masyarakat lokal mendatangkan berbagai implikasi. Cara pandang program pembangunan terhadap masyarakat bertemu dengan cara pandang masyarakat melihat pembangunan. Dalam bahasa Laksono (2002:383), perspektif pembangunan yang ditanamkan oleh rezim Orde Baru adalah sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, sehingga apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap “keterbelakangan”. Hal yang dianggap keterbelakang salah satu dan yang terpenting adalah kebudayaan tradisional komunitas tempatan yang dipandang sebagai penghalang proses pembangunan, yang kemudian diartikan secara sempit sebagai modernisasi. Dengan demikian, pembangunan itu identik dengan kesadaran baru yang hadir dan diterima lepas dari budaya tempatan.



Salah satu karya dari Nobodycorp (foto: dokumentasi Nobodycorp).

Pembangunan yang diintrodusir negara merasuk dalam kesadaran masyarakat tempatan bukan sebagai sintesa proses historis budaya-budaya tempatan, tetapi lewat daya pikat citra sukses pembangunan di negera-negara industry maju yang didukung kekuatan modal. Lambat laun tapi pasti, tergusurnya masyarakat tradisional tidak semata-mata merupakan sola hilangnya keaslian budaya tradisional masyarakat tempatan, tetapi juga merupakan soal hilangnya pribadi dan rasa percaya diri masyarakat tempatan dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya (Laksono 2002:384).

Berbagai ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hadirnya “rezim-rezim baru” dalam berbagai wujudnya di Tanah Papua sering kali mengabaikan atau alpa merekognisi (mengakui) pengetahuan dan sejarah masyarakat lokal yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan tanah, lingkungan, sosial budaya, dan berbagai nilai dan norma yang lahir dan hidup bersama kehidupan mereka. Salah satunya adalah filosofi dan pemahaman mereka tentang tanah yang jauh berbeda dengan tanah yang dianggap sebagai modal (*capital*) yang bisa diperjual belikan.

Orang Mee yang menyebut diri mereka “manusia utama” memaknai tanah (*Maki*) sebagai mama (*Akukai*) yang memberikan kehidupandari tanah maupun manusia. Jika tanah tidak diperhatikan maka hubungan manusia, Tuhan, dan alam itu tidak akan ada. Orang Mee sering menyebut para penjual tanah dengan *Dimi Beu* (orang gila atau orang yang tidak mempunyai pikiran). Tanah menurut orang Mee juga memiliki klasifikasinya sendiri yaitu tanah yang sakral, tanah untuk mata pencaharian, dan tanah untuk umum.⁴ Dalam bahasa Maybrat, tanah disebut dengan *Tabam*. Filosofi tanah menurut orang Maybrat menggambarkan alam semesta, termasuk di dalamnya kehidupan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Dalam bahasa Maybrat: “*Tabam Fo Msaka Ra Msikowah Fe, Anu Ra Oh Bsikowah Bo To*” (Dunia/alam semesta itu tidak merusak manusia tetapi manusialah yang merusak). Jadi kehidupan atau tingkah laku manusia di dunia digambarkan dalam filosofi tanah (*Tabam*).⁵

Filosofi dari pengetahuan local itu sangat berbeda dengan filosofi pembangunan yang justru melakukan kapitalisasi terhadap tanah. Dalam konteks yang lebih problematik, pembangunan juga telah menjadi pemicu dari keterpecahan dan sikap pragmatis—salah satunya terhadap tanah—yang telah menjalar di tengah masyarakat Papua dan juga Indonesia secara umum. Berbagai program pembangunan melalui proyek-proyek berlangsung. Kontraktor-kontraktor pun bermunculan di kampung-kampung guna mengakses proyek yang ditawarkan oleh Pemerintah

Daerah. Ini belum termasuk berbagai program-program pembangunan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan berbagai nama bertajukkan pemberdayaan masyarakat kampung. Masyarakat di kampung dihadapkan pada situasi banyaknya program pembangunan yang masuk ke daerah mereka dengan berbagai tawaran dana-dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Suatu hari di pertengahan Mei 2013, di sebuah kampung pegunungan Distrik Teluk Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Papua Barat, sekelompok masyarakat yang berkumpul di balai kampung sedang membahas masuknya program pemerintah bertajuk pemberdayaan masyarakat kampung. Dana yang akan masuk untuk pembangunan kampung berjumlah ratusan juta rupiah. Masyarakat mengetahui adanya dana tersebut dari sosialisasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping distrik dan fasilitator kabupaten. “*Tong pu* pikiran “barang ini” (baca: program pembangunan) masuk *su* ada dana *jadi*,” ujar seorang warga mengawali pembicaraan. Masyarakat berpikir bahwa ketika program-program pembangunan masuk ke kampung disertai dengan dana, maka pikiran utama adalah bagaimana memanfaatkan dana yang masuk itu sebagai pekerjaan untuk dibagi-bagi kepada anggota masyarakat.⁶

Garis depan bersinggungannya masyarakat adat dan kuasa investasi global inilah yang oleh Tsing (2005) disebut dengan friksi (*friction*). Di ruang friksi ini terjadi pertemuan kekuatan-kekuatan kapital global dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia di garis depan (*frontier*) yang mengacu wilayah-wilayah terdepan pertemuan kepentingan masyarakat dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan kuasa kapitalisme global. Dalam pertemuan di ruang-ruang *frontier* itulah menuntut masyarakat tempatan untuk memanfaatkan peluang, bersiasat dan sekaligus berpolitik. Di dalamnya akan dijumpai fragmen-fragmen yang menunjukkan interkoneksi yang aneh, tak terduga, kreatif, dan tak stabil. Apa saja akan menjadi komoditi, barang dagangan, direproduksi terus-menerus. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan direproduksi terus-menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti (Suryawan 2011; Laksono 2009).

Ada baiknya kita memeriksa kembali cara kita memandang masyarakat adat dan relasinya dengan tanah, hutan dan sumber daya alam. Meminjam perspektif James C. Scott (1995; Zakaria dan Lounela 2002:7) yang menjelaskan bahwa untuk negara seringkali melakukan penyederhanaan-penyederhanaan dalam mengelola dan menetapkan regulasi (aturan) terhadap tanah dan hutan. Penyederhanaan inilah yang

disebut dengan “simplifikasi negara” (*state simplifications*) dalam memandang heterogenitas kebudayaan dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas hutan dan tanah. Proses penyeragaman atau membuat heterogenitas itu tidak berarti adalah sebuah usaha untuk meredam gerakan-gerakan rakyat yang dilakukan oleh negara yang berkolaborasi dengan kuasa capital global.

Sejarah relasi historis masyarakat adat dengan tanahnya, hutannya itulah yang harus direkognisi (diakui), digali pengetahuan-pengetahuan lokal yang tersimpan di dalamnya, dan direvitalisasi dalam konteks perubahan social yang dialami masyarakat adat sehingga berguna untuk dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat kekinian. Menangkap kompleksitas relasi historis masyarakat adat dengan tanah/hutannya serta transformasi social yang menimpa masyarakat adat kini, perspektif penyederhanaan (*simplifications*) yang dilakukan oleh negara melalui pendekatan “pembangunanisme” terancam kekurangan bahasa untuk menangkap “isi hati” masyarakat dan semangat perubahan sosial yang mereka inginkan.

Interkoneksi dan Pembaharuan

Tidak terbantahkan bahwa seluruh wilayah di dunia ini telah terhubung melalui hubungan-hubungan pengetahuan, kapital dan sekaligus juga ide-ide tentang “kemajuan” yang dibawa oleh modernitas. Salah satu bentuk wujud modernitas tersebut adalah dalam bentuk pembangunan yang mentautkan (menghubungkan) orang-orang dengan imajinasi serta mimpi yang berbeda-beda. Namun di sisi yang lain, komunitas-komunitas suku bangsa menghadapi tantangan untuk mengambil bagian dalam perubahan sosial budaya yang berlangsung di tanah mereka. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunitas lokal ini dalam merespon dan menyikapi penetrasi global yang menyerang mereka.

Sebenarnya komunitas-komunitas suku asli atau tempatan di Indonesia dan di negara lainnya menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan komunitas non-asli. Komunitas non-asli ini adalah para migran yang menyebar ke berbagai wilayah di negeri ini. Mereka, para migrant ini secara keseluruhan lebih dominan, lebih besar, dan lebih terorganisir lebih baik dalam menghadapi enam kecenderungan global. Enam kecenderungan itu adalah: krisis ekonomi, proses militerisasi, krisis negara, penyangkalan terhadap hak-hak manusia dan identitas cultural, konflik atas sumberdaya alam, serta masalah sains dan teknologi yang lolos dari kendali. Masalah-masalah yang menimpa minoritas suku asli adalah:

pemindahan, pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi akibat tuntutan dari luar atas sumberdaya alam di sekitarnya.

Penetrasi modal yang eksploitatif ke dalam perekonomian suku asli seringkali justru didukung oleh negara dengan alasan ingin memajukan kaum minoritas suku asli melalui program-program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes 1993:1-3). Corak kehidupan suku-suku asli telah dilihat sebagai hasil hubungan variable bebas dengan variable tergantung dengan pusat perhatian pada kehidupan suku asli yang perlakuan sebagai variable tergantung, sehingga program pembangunan dilihat dari perspektif suku asli. Oleh karena itu di sana tidak dihasilkan “model alternative” yang relevan dengan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya...pusat perhatian harus digeser dari yang berpusat pada kehidupan suku asli ke hubungan antara pemerintah atau Negara dengan suku asli melalui garis hubungan pembangunan” (Suparlan 1993:xii).



Masyarakat di wilayah pedalaman kepala burung Papua dengan alat-alat berat yang ditinggalkan oleh perusahaan kayu yang mengeruk kekayaan hutan mereka (foto: I Ngurah Suryawan).

Dalam bayangan Suparlan (1993) hubungan-hubungan itu terwadahi secara hirarkis sesuai konteksnya dalam hakikat Negara yang

berupa masyarakat majemuk dan menghasilkan satuan-satuan perantara yang fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik menjadi menguntungkan kedua belah pihak. Katanya model perantara ini dapat berguna untuk membentengi kehidupan suku asli dari penetrasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah karena di sana kepentingan-kepentingan dan hirarki yang berbeda-beda yang berasal dari pemerintah/pihak luar dan dari suku asli dapat diakomodasi. Penetrasi pemerintah dan system perekonomian yang kapitalistik dan eksploitatif pun melalui model perantara itu secara bertahap dapat diserap oleh komunitas suku asli.

Persoalan klasik dari model perantara yang diusulkan oleh Parsudi Suparlan, setelah penetrasi capital itu dianggap sebagai nasib yang tak terhindarkan, adalah siapakah yang menanggung beban “biaya” bagi para perantara itu? Bukankah demi efisiensi dan hubungan yang saling menguntungkan itu, matarantai dari asal sumberdaya (produsen) dan para pengguna sumberdaya (konsumen) malah perlu diperpendek agar biaya membengkak (kompliksi/siasat tipu muslihat) karena panjangnya mata rantai distribusi dapat dikurangi? Mana yang lebih menguntungkan para warga komunitas tempatan (asli), investasi asing itu langsung tanpa perantara atautkah pakai perantara? Jika pakai perantara, berapa panjang matarantainya? Bukankah hampir dalam semua kasus beban perantara itu selalu lebih berat dipikul oleh mereka yang lemah, yaitu para warga tempatan, karena para perantara itu cenderung memihak yang kuat dan menguntungkan dirinya? Mungkinkah persoalan-persoalan ini dijawab atau dihindari oleh para warga komunitas tempatan?

Kesimpulan

Masyarakat tempatan adalah komunitas yang dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dinamika yang terjadi adalah interaksinya adalah merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan. Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat berhasil mengidentifikasi dirinya dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, yang mampu membuat sejarahnya sendiri atau menghadirkan waktu transendennya sendiri.

Dalam kasus Papua, program-program pembangunan dan investasi telah menghubungkan berbagai macam latar belakang orang Papua dengan

dunianya masing-masing. Di tengah proses inilah menjadi penting memperhatikan pergerakan orang-orang Papua dalam dinamika pembangunan di Tanah Papua yang mentautkan identitas dirinya dengan dunia global. Dalam konteks ini, memahami imajinasi orang Papua tentang diri dan lingkungannya memerlukan pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat-siasat mereka dalam merespon pembangunan dalam bentuk berbagai macam program dan tawaran “pemberdayaan” yang dilakukan oleh negara.

Mengacu kepada kondisi keterhubungan dan siasat-siasat orang Papua ini, Pouwer dan Hannan (Timmer, 2011;2012) sejak dulu sudah mengungkapkan bahwa masyarakat Papua sejak dahulu kerap bergerak (*Peoples on the Move*) yang berkaitan dengan dinamika migrasi, peranan *kain timur* di wilayah kepala burung Papua, dan benda utama dalam pertukaran perkawinan. Jika dikontekstualisasikan pada saat ini, keterhubungan orang-orang Papua dimediasi oleh instrument-instrumen yang ditawarkan oleh negara berupa pemekaran daerah, pendidikan, dan lembaga-lembaga modern terutama dalam birokrasi pemerintahan yang memungkinkan orang Papua untuk secara terus-menerus bergerak memperbaharui dirinya.

Namun di tengah kondisi yang “melumpuhkan” di tataran pemerintahan itu, bagaimanapun pembangunan yang terjadi di Tanah Papua telah menghubungkan dan sekaligus memungkinkan orang Papua untuk memikirkan tentang posisi dirinya dalam dunia yang sedang berubah. Pada momen-momen inilah orang Papua dapat berpikir melampaui batas-batas budayanya dan dapat bersatu demi kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sudah pasti tantangan yang harus dihadapi, terkhusus dalam salah satu konteks pembangunan yaitu pemekaran daerah, adalah kecenderungan kebanyakan orang Papua yang berjuang atas nama pemekaran ini untuk kembali mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari sejumlah kelompok tertentu yang biasanya terkait dengan kelompok etnik dan marganya.

Imajinasi tentang identitas-identitas baru yang sekarang sedang berkembang di Tanah Papua hanya akan mungkin berkembang baik jika orang-orang Papua berpikir melampaui kebudayaan etniknya dan mempertautkan dirinya dengan dunia global. Perspektif lintas batas sangat memungkinkan karena Papua sudah terkoneksi dengan dunia global dan merangsang sebuah inisiatif dialog lintas batas dalam memperbarui wawasan orang Papua tentang identitas dan posisinya dalam dunia global.

Endnotes:

¹Penulis adalah Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. ngurahsuryawan@gmail.com

²Kertas kerja dalam Seminar Nasional Indonesia Timur (SENANTI) 2015 dengan tema “Memahami Identitas

Sosial Budaya Indonesia Timur dan Merajut Ke-Indonesiaan” oleh Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 18 Juni 2015. Beberapa bagiannya adalah esai-esai untuk kolom Humaniora di sebuah media lokal di Kota Manokwari, Papua Barat.

³Catatan lapangan Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, 19 Mei 2013.

⁴Wawancara 30 Juli 2013.

⁵Wawancara 29 Juli 2013.

⁶Catatan lapangan Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, 20 Mei 2013.

Bibliography

- Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). 2011. "Masih Ada Dusta di Antara Kita: Catatan Kritis Asosiasi Antropologi Indonesia Menuju Papua yang Damai" Jakarta, 11 November 2011.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2008, "Pemekaran Daerah di Papua: Kesejahteraan Masyarakat vs Kepentingan Elit", makalah Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: "Dampak Bencana Alam dan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Ekonomi Indonesia", Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.=
- Chauvel, Richard. 2005. *Consctructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center
- Flassy, Don. 1995. *Pembangunan Berwawasan Identitas, Sebuah Tuntutan di Irian Jaya*. Jayapura: Irian Jaya Studies.
- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Giay, Benny. 1996, "Pembangunan Irian Jaya dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Antropologi" makalah dalam Simposium Masyarakat dan Pembangunan di daerah Irian Jaya yang dilaksanakan BPC GMKI Jayapura tahun 1996.
- Henley, David, Jamie Davidson dan Sandra Moniaga (editor). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hommers, Paulus L. 2003. "Kontroversi dalam Kasus Pemekaran Provinsi di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Vol. 1, No. 3, Desember 2003.
- Kementrian Dalam Negeri dan Kemitraan, 2011.*Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025*.Jakarta: Kementrian Dalam Negeri dan Kemitraan.
- Laksono, P.M.2011. "Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas". Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Nataliske-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.

- Laksono, P.M. 2010b. "Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi". Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
- Laksono, P.M. 2010. "Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia". Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2009a. *Spektrum Budaya (Kita)*, Jogjakarta, Kepel Press kerjasama PSAP UGM.
- Laksono, P.M. 2002. "Tanpa Tanah, Budaya Nir-Papan, Antropologi Antah Berantah" dalam Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (editor). (2002). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist, Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
- Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (editor). (2002). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist, Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
- Ramstedt, Martin dan Fadjar Ibnu Thufail (editor). (2011). *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa Pasca-Orde Baru*, Jakarta: PSDR LIPI, Max Planck Institute for Social Anthropology dan Grasindo.
- Scott, James C. (1995). *State Simplifications, Some Applications to Southeast Asia*. Amsterdam: CASA.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625.

- Pamungkas, Cahyo. 2004. "Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat", *Jurnal Masyarakat Indonesia* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia, Jilid XXX. NO. 1. 2004
- Prakarsa Rakyat, 2007. "Situasi Sosial Politik di Wilayah Kepala Burung Provinsi Papua Barat, Inisiatif Perlawanan Lokal Simpul Kepala Burung Papua Januari - Maret 2007".
- Suryawan, I Ngruh. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli - Desember 2013.
- Suryawan, I Ngruh. 2013b. "Identifying the Dynamics and Complexities of Dewan Adat Papua (Papuan Customary Council): Cultural Identities and Responses" in *Local Civil Societies Dynamics in Indonesia*, PM Laksono, Sukamdi, Lauw Schauen (editors), CIDIN Radboud University Nijmegen The Netherlands dan UGM Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngruh. 2012. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari - Juli 2012.=
- Suryawan, I Ngruh. 2012b. *Jiwa yang Patah*, Yogyakarta: Pusbadaya Unipa dan Kepel Press
- Suryawan, I Ngruh. 2011. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300).
- Suryawan, I Ngruh. 2011b. "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005. *Friction: An Ethnography Of Global Connection*, Princeton University Press

- Widjojo, Muridan. 2001. "Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru", Paper dalam kerangka "Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation pada tahun 2001.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.
- Zollner, Zilfred. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Evangelical Church in the Rhineland dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.